

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Namun dalam implementasi kebijakan tersebut belum bisa dikatakan optimal karena ditemukan fakta dilapangan yang dimana terdapat permasalahan yang pertama, pada aspek perbaikan asupan gizi masyarakat dimana kegiatan PMT yang dilakukan bermasalah pada tidak tepatnya sasaran penerima PMT dan juga tidak adanya konsistensi dari program tersebut. Kedua, terkait peningkatan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah, dan lingkungan yang terdapat masalah dalam yakni kondisi perpipaan terhadap akses air baku kurang baik dan perlu adanya peremajaan pipa. Ketiga, adalah realisasi anggaran yang belum maksimal dimana realisasinya hanya sekitar 62% dan terkendala di pencairan anggaran yang lama sehingga realisasinya tidak bisa tepat waktu dan maksimal.

Jika ditinjau dari penelitian yang dilakukan berdasarkan teori kebijakan George C. Edward III maka yang pertama, adalah faktor komunikasi, Dalam komunikasi yang dilakukan, penyampaian (transmisi) berkaitan dengan implementasi kebijakan *stunting* sudah dilakukan baik itu melalui rapat koordinasi ataupun kegiatan seperti minilokakarya. Komunikasi yang dilakukan juga memiliki konsistensi dan berkelanjutan melalui berbagai media dari media digital hingga media konvensional. Namun terdapat kendala dalam aspek kejelasan informasinya dimana pemerintah terlalu fokus dalam penyampaian komunikasi informasi secara

digital tanpa memperhatikan masyarakat yang tidak bisa mengakses informasi secara modern seperti lapisan masyarakat menengah kebawah dan juga lanjut usia dimana mereka kebanyakan adalah masyarakat yang gagap teknologi sehingga penyampaian informasi menjadi tidak maksimal dan bisa menghambat implementasi kebijakan pencegahan *stunting*.

Kedua, adalah faktor sumber daya. Sumber daya mencakup staf dan fasilitas dimana dalam implementasi kebijakan pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang memiliki tim khusus untuk menangani *stunting* dan berkompeten yang memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri yang direkrut dari berbagai lapisan seperti mengikutsertakan dari kedokteran, akademisi kampus hingga kader-kader. Sarana dan prasarana fasilitas dalam kebijakan juga terbilang baik, pemerintah memfasilitasi dalam bentuk fisik maupun non fisik seperti memfasilitasi alat anthropometri hingga memfasilitasi dalam bentuk gerakan sosial yang fokusnya untuk menekan kasus *stunting* di Kabupaten Rembang.

Ketiga, adalah faktor disposisi yang mencakup efek disposisi, pengaturan birokrasi dan insentif. Dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang, tidak ada efek disposisi negatif yang muncul atau sikap pelaksana dinilai cukup baik dan memberikan dampak yang positif ditandai dengan penilaian kerja pencegahan yang baik. Dalam implementasi kebijakan *stunting* di Rembang memiliki pengaturan birokrasi masing-masing sesuai dengan tugas mereka, hierarki dan peraturan formal yang jelas dan baku. Namun hambatan justru terdapat pada aspek pemberian insentif bagi para pelaksana dimana tidak ada insentif yang diberikan kepada para pelaksana di Kabupaten Rembang sehingga akan mengganggu kinerja dari pelaksana

dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka.

Keempat adalah faktor struktur birokrasi, khususnya SOP sudah terdapat SOP yang menjadi pedoman dan dijalankan dalam pencegahan *stunting* di Kabupaten Rembang seperti berpedoman pada Peraturan Bupati 52 Tahun 2020, SK TPPS, Pedoman PMT, instruksi PKK dan sebagainya.

4.2 Saran

Perlu upaya lebih dalam memaksimalkan kebijakan pencegahan *stunting* pada aspek pelaksanaan berkaitan dengan kegiatan PMT dan peningkatan aksesibilitas air bersih, sanitasi rumah, dan lingkungan di Kabupaten Rembang dan alokasi anggaran yang mesti ditingkatkan kembali penyerapannya agar bisa terserap maksimal. Di sisi lain, banyaknya masyarakat yang belum sadar dan paham mengenai *stunting*, Pemerintah Kabupaten perlu lebih meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat dengan upaya yang dipahami masyarakat awam. Pemerintah Kabupaten Rembang perlu memberikan insentif kepada para pelaksana karena jika terdapat insentif akan membuat pelaksana terdorong untuk bekerja lebih giat kedepannya.